

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

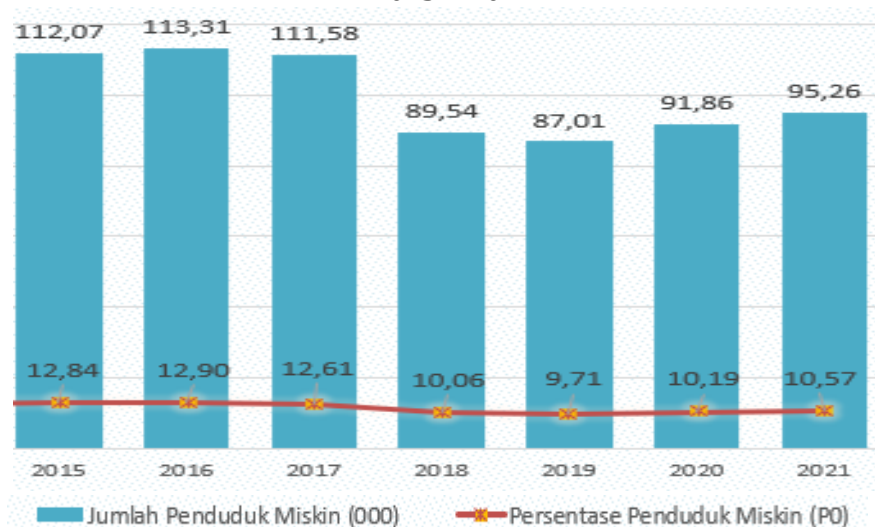
Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) bertujuan untuk menghapus kemiskinan dan kelaparan, mengurangi ketimpangan baik di dalam maupun antar negara, meningkatkan manajemen air dan energi, dan mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim. SDGs juga berupaya dengan menekankan pentingnya usaha bersama untuk mengakhiri kemiskinan, memenuhi berbagai kebutuhan sosial, dan melindungi lingkungan.



Sumber: Data BPS, 2021

Data dari BPS menunjukkan bahwa tingkat penduduk miskin Indonesia dari 2015 hingga 2019 terjadi penurunan setiap tahunnya meskipun sangat landai. Namun pada Maret 2020 peningkatan 0,56% poin sejak bulan September 2019 dan peningkatan 0,37% poin sejak bulan Maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, peningkatan 1,63 juta orang sejak bulan September 2019 dan peningkatan 1,28 juta orang sejak bulan Maret 2019 dan terus mulai turun di tahun 2021 sebesar 10,14% pada Maret dan 9,71% pada September 2021.

Gambar 1. 2
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 – 2021



Sumber : BPS, 2021.

Di Kabupaten Pekalongan juga menunjukkan profil yang sama sebagaimana terlihat pada data di gambar 1.2. Jika merujuk pada data di Gambar 1.2, secara rinci dapat dilihat bahwa tahun 2015, persentase kemiskinan mencapai angka 12,84% (112,07 ribu jiwa). Pada tahun 2016, persentase kemiskinan kembali bertambah menjadi 12,90% atau 0,06% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, perubahan persentase tersebut

juga dapat dilihat dari kenaikan jumlah penduduk miskin di tahun 2016 mencapai 113,31 ribu jiwa.

Penurunan kemiskinan yang signifikan terjadi di tahun 2018, dalam waktu satu tahun persentase kemiskinan turun sebesar 2,55% yang semula 12,61% menjadi 10,06%. Penurunan tersebut setara dengan 22,04 ribu jiwa terlepas dari kemiskinan. Penurunan tersebut masih berlanjut pada tahun 2019, target pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk mencapai satu digit tingkat kemiskinan akhirnya terwujud. Selama sebelas tahun terakhir, 2019 merupakan tahun di mana tingkat kemiskinan di Kabupaten Pekalongan mencapai titik terendahnya, yaitu sebesar 9,71% atau 87,01 ribu jiwa. Namun sayangnya, pandemi covid-19 menghentikan laju penurunan jumlah penduduk miskin tersebut. Pada tahun 2020, kemiskinan Kabupaten Pekalongan naik dan menyentuh angka 10,19% atau naik sebanyak 4,85 ribu jiwa. Peningkatan kasus aktif covid di tahun 2021 berimbas pada kemiskinan yang semakin memburuk. Ekonomi masyarakat belum pulih sepenuhnya, sebagai akibatnya persentase penduduk miskin naik dan mencapai angka 10,57% di tahun 2021 atau sebanyak 95,26 ribu jiwa masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Dalam kegiatan Presentasi dan Wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2020, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menyampaikan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa program-programnya memiliki sifat sentralistik, eksklusif, dan kurang inovatif. Selain itu, program-program

tersebut juga tidak didasarkan pada data valid dan jelas. Oleh karena itu, dibutuhkan program yang inovatif untuk mengentaskan kemiskinan di setiap wilayah Kabupaten Pekalongan yang membentang dari daerah pesisir pantai sampai pegunungan.

Pada Tahun 2018 Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menggagas inovasi pengentasan kemiskinan dengan nama Laboratorium Kemiskinan (Republika, 2018). Dalam pelaksanaannya, Laboratorium Kemiskinan diterjemahkan oleh BAPPEDA LITBANG Kabupaten Pekalongan. Laboratorium Kemiskinan merupakan inovasi pengentasan kemiskinan yang pertama dengan pendekatan topografi. Laboratorium Kemiskinan merupakan upaya dan komitmen Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan Pengentasan Kemiskinan di semua wilayahnya. Hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan bertahapnya mutu kesejahteraan masyarakat, yakni:

1. Meningkatkan program perlindungan sosial;
2. Meningkatkan akses pelayanan dasar;
3. Memperkuat pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Laboratorium Kemiskinan yakni inovasi terkini dalam usaha menangani masalah kemiskinan yang mencakup wilayah kabupaten . Metode yang digunakan dalam Laboratorium Kemiskinan menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) serta diperkuat *Participatory Poverty Assessment* (PPA). Pendekatan topografi juga digunakan karena tiap

topografi memiliki faktor yang menyebabkan kemiskinan beda ('Resep' Kabupaten Pekalongan Tekan Angka Kemiskinan, 2020).

Inovasi ini merupakan pertama kalinya di Indonesia. Sisi inovatif inovasi ini adalah:

1. Fokus : menjadikan desa miskin sebagai laboratorium sosial, lokus penanggulangan kemiskinan.
2. Tepat : Pendekatan penanggulangan kemiskinan secara mikro, *by name by address* dan *by problem* dengan basis data Basis Data Terpadu yang telah divalidasi dan telah dibangun aplikasi terpadu intervensi kemiskinan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
3. Integratif : kolaborasi *pentahelix* antara Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, kelompok masyarakat peduli dan media.
4. Humanis : menempatkan si miskin sebagai subyek karena kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai persoalan ekonomi tetapi juga sosial budaya.

Jumlah Desa/Kelurahan Kabupaten Pekalongan yakni 285, tersebar di daerah pesisir, perkotaan dan pegunungan. Kemiskinan terjadi di semua topografi karakteristik berbeda. Desa pesisir memiliki karakteristik penghidupan dari sumber laut, desa perkotaan memiliki karakteristik dari industri dan jasa, dan desa pegunungan memiliki karakteristik hasil pertanian. Berdasar Basis Data Terpadu (BDT) 2015, 67 desa disebut

sebagai desa merah, 119 disebut sebagai desa kuning, dan 99 disebut sebagai desa hijau.

Laboratorium Kemiskinan merupakan upaya untuk mengatasi persoalan kemiskinan secara terpadu, tepat program, tepat sasaran serta tepat guna harus disesuaikan dengan topografi yang berbeda. Oleh karena itu, Laboratorium Kemiskinan diciptakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan karakteristik warga miskin. Cara untuk mewujudkannya adalah dengan mendorong partisipasi masyarakat, membangun dan mengembangkan potensi serta sumber daya alam desa untuk bertransformasi dari merah menjadi hijau dan kuning. Tiga desa sampel dipilih mewakili topografi Rumah Tangga Miskin tinggi pada setiap topografi menjadi desa pilot penanganan kemiskinan. Tiga desa yakni Desa Mulyorejo desa miskin daerah pesisir pantai, Desa Kertijayan desa miskin daerah perkotaan dan Desa Botosari mewakili desa miskin daerah pegunungan (sepakat.bappenas.go.id, 2019). Hasil dari inovasi Laboratorium Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan telah berhasil membawa Desa Botosari dan Desa Mulyorejo keluar dari kategori desa merah, sedangkan Desa Kertijayan masih belum berhasil dari kategori desa merah. Inovasi ini berhasil memperoleh penghargaan TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, yang lebih dikenal dengan SINOVIK. Kompetisi tahunan ini diadakan oleh KemenPAN RB Republik Indonesia.

Sebagaimana uraian di atas, Laboratorium Kemiskinan ini merupakan sebuah inovasi pelayanan publik. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik,

“Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada.”

Kriteria inovasi pelayanan publik menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan cara, pendekatan atau kebijakan dan desain pelaksanaan baru dan berbeda dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Efektif, yaitu menghasilkan keluaran yang nyata sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. Bermanfaat, yaitu memberikan dampak bagi peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Mudah disebarkan, yaitu mudah untuk ditiru dan dikembangkan oleh Penyelenggara Inovasi lainnya; dan

- e. Berkelanjutan, yaitu terus diterapkan dan dikembangkan secara berkesinambungan, serta mendapat dukungan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas peneliti mempunyai ketertarikan mengambil kajian berjudul **“INOVASI LABORATORIUM KEMISKINAN DI KABUPATEN PEKALONGAN”**. Dengan pembahasan kajian, yakni “Mengapa penyelenggaraan inovasi Laboratorium Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan khususnya di Desa Kertijayan belum optimal?”

1.2 Identifikasi Permasalahan

Permasalahan diidentifikasi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan inovasi Laboratorium Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan khususnya di Desa Kertijayan belum optimal.
2. Desa Kertijayan belum berhasil keluar dari kategori desa merah.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana proses inovasi Laboratorium Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat keberhasilan inovasi Laboratorium Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan khususnya di Desa Kertijayan?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Guna menganalisis proses inovasi Laboratorium Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan.
2. Guna menganalisis faktor-faktor penghambat keberhasilan Inovasi Laboratorium Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan khususnya di Desa Kertijayan.

1.5 Manfaat Penelitian

Kajian diharapkan mempunyai manfaat yakni:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat digunakan sebagai rujukan guna penambahan wawasan serta bahan acuan kajian sejenis di masa mendatang.
 - b. Dapat meningkatkan kekayaan administrasi pelayanan publik terkait dengan inovasi dalam hal penanganan kemiskinan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Universitas Diponegoro

Kajian bisa menambah koleksi, hingga menyumbang wawasan luas mengenai pengkajian inovasi bidang pelayanan publik.

- b. Bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan

Memberikan pengertian bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah mengambil keputusan mengenai inovasi pelayanan publik di Kabupaten Pekalongan.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Bagian ini membahas hasil kajian sebelumnya, yang mencakup berbagai hasil kajian terkait serta dapat dijadikan referensi bagi para peneliti pada kajiannya:

Kajian Nasikun (2002) menyatakan Program penanggulangan kemiskinan sebagai suatu aksi sosial bermanfaat sangat besar, yakni guna mendorong penduduk miskin. Namun, program ini menemui rintangan berat. Pertama, sebagai gerakan sosial program penanggulangan kemiskinan wajib mempunyai ciri aktivitas sosial di mana indikator keberhasilannya diukur dengan seberapa jauh program tersebut melibatkan banyak penduduk miskin di dalam pelaksanaannya. Kedua, untuk memastikan keberlangsungan hidup dan kesinambungannya, jaringan organisasi sosial yang kuat harus untuk mendukungnya, mulai dari skala kecil yang *grassroot* hingga organisasi sosial regional, nasional, dan bahkan internasional. Ketiga, program tersebut harus mendapatkan dukungan dan dikuatkan dengan identifikasi kelompok yang kuat serta sistem pembagian kerja yang terbuka di antara para pendukungnya. Keempat, badan pendukungnya harus terus menerus diperkuat dalam suatu jaringan organisasional melalui pertemuan, seminar, lokakarya, dan sebagainya. Kelima, program penanggulangan kemiskinan sebagai gerakan sosial juga perlu memiliki lambang-lambang. Keenam, program penanggulangan kemiskinan sebagai gerakan sosial harus terus menerus membangun ideologi alternatif untuk

memperbaiki atau mengganti program-program penanggulangan kemiskinan yang sudah ada sebelumnya.

Penelitian I G. W. Murjana Yasa (2005) menjelaskan Penanggulangan kemiskinan harus melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan pendekatan partisipatif, akan memungkinkan masyarakat untuk belajar serta mengubah perilaku mereka menjadi lebih layak. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dapat dikurangi dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

Sementara itu penelitian Marcus J. Pattinama (2009) yang fokus pada tiga hal, yaitu pertama mendalami pemahaman pengertian serta indikator kemiskinan secara teori maupun bersumber dari pemahaman penduduk miskin itu sendiri. Fokus kedua adalah menggali solusi-solusi kebijakan yang kongkrit untuk mengatasi kemiskinan di setiap wilayah, serta mengumpulkan dan mempelajari kearifan lokal terkait usaha untuk mencegah kemiskinan. Kajian menyatakan kemiskinan banyak sisi penting guna menganalisa pandangan berbeda (*multilenses*) untuk mendefinisikannya. Di dalam kajian ini, konsep kemiskinan subjektif yang akan diteliti. Sinergi antara definisi yang dibuat oleh penduduk miskin dan kelompok luar seperti pemerintah, lembaga riset, dan swasta/bisnis diharapkan dapat menghasilkan pendefinisian yang lebih spesifik untuk masyarakat tertentu di lokasi tertentu, yang merupakan pandangan yang holistik, sistemik dan dinamis. Namun, untuk mencapai tujuan ini diperlukan komitmen dan usaha yang berkelanjutan untuk menganalisanya

karena mengakhiri kemiskinan hanya dapat dilakukan dengan belajar dari tindakan nyata bukan hanya melakukan pembicaraan.

Penelitian Kurniawan et al (2014) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui UMKM dalam rangka penanggulangan kemiskinan Pemberdayaan UMKM di Dusun Waru Rejo ini merupakan langkah yang diambil untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat yang masih tergolong miskin. Usaha yang dimiliki oleh setiap warga dapat menampung hingga 10-15 karyawan. Hal ini berarti bisa mengurangi angka pengangguran di Dusun Waru Rejo. Namun, pemberian modal usaha saja yang dilakukan oleh pemerintah kurang maksimal dan belum mampu memberikan bantuan yang diperlukan untuk mengembangkan UMKM secara optimal.

Faktor pendukung yang membantu UMKM berhasil mencakup sumber daya manusia yang berlimpah, bahan baku yang mudah didapat dan murah, modal usaha yang kecil, dukungan peralatan desa, pasokan bahan baku yang tidak terputus, dan kesepakatan harga jual antar anggota kelompok usaha Perkumpulan Kembang Waru. Faktor penghambat pemberdayaan UMKM antara lain buruknya infrastruktur, minimnya dukungan pemerintah, minimnya tempat pembuangan limbah, dan minimnya pusat pemasaran produk.

Hasil kajian Saragih (2015) dengan permasalahan yang diangkat pada adalah menurunnya kemiskinan DIY yang masih sedikit serta masih banyaknya warga miskin. Metodologi yang digunakan adalah metode

deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Evaluasi secara berkala harus dilakukan terhadap kebijakan dan program pengentasan kemiskinan di DIY untuk menemukan solusi strategis di masa depan dan jangka menengah.

Hasil penelitian Kushandajani (2015) bahwa Kepemimpinan Walikota Pekalongan yang kuat dan terpercaya merupakan faktor penting yang mengakibatkan ide-ide pembaharuan dapat dikelola dengan baik sehingga dapat menghasilkan program yang dapat diterapkan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat dengan efektif. Hal ini ditunjukkan melalui komitmennya di mana kelurahan diharapkan untuk mengelola program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faktor kedua adalah dukungan dan Kerjasama DPRD. Anggota DPRD yang memahami cara mengelola program-program pemberdayaan masyarakat menggerakkan dan juga bersama-sama dengan walikota dalam mengatur peraturan daerah yang menguntungkan para miskin. Ketiga, adanya dukungan dari Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) dengan cara memberikan bantuan program-program pemberdayaan masyarakat ke desa-desa.

Penelitian Erna Setijaningrum (2017) menunjukkan bahwa Penanggulangan kemiskinan di Kota Surabaya dapat berjalan secara efektif jika dioperasikan dengan program terpadu. Tiap instansi yang ada di Kota Surabaya harus menyusun program penanggulangan kemiskinan yang saling memiliki keterpaduan dan koordinasi dengan instansi lain.

Selanjutnya, langkah yang harus dilakukan untuk menyinkronkan program tersebut, yakni pemetaan dan sinkronisasi program dengan program yang dimiliki oleh badan lainnya. Dari tahap ini akan tampak program yang *overlapping* sehingga harus dicermati instansi mana dimana baik menjadi pelaksana. Tahap terakhir adalah Kerja sama antara berbagai unit mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi program.

Penelitian Ivana Andi Sabani (2017) kajian menunjukkan Pemerintah Kabupaten Purbalingga berhasil dalam upayanya untuk menanggulangi kemiskinan dengan mendirikan Sekolah Gratis *Boarding School* SMK Negeri 3. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan utama. Dengan keberlanjutan program ini akan menghasilkan lebih banyak lulusan yang berpeluang untuk memutus mata rantai kemiskinan.

Penelitian Sutopo dan Ayu Mutiara (2018) tentang penyebaran (difusi) dan Penerimaan Layanan “*Mbela Wong Cilik*” UTPK Kabupaten Sragen berhasil difusikan melalui berbagai saluran komunikasi sehingga pesan inovasi dapat tersampaikan kepada masyarakat miskin di daerah tersebut. Proses adopsi di masyarakat juga berjalan dengan baik melalui berbagai faktor pendorong dan penghambat. Penelitian ini mencatat bahwa inovasi ini berhasil difusikan kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi dan tahapan adopsi yang tepat.

Hasil penelitian Rahmad Purwanto (2019) Kota Semarang telah menunjukkan contoh yang baik dalam menanggulangi kemiskinan dengan cara mengintegrasikan program-program pemberantasan kemiskinan dari pusat, provinsi dan program-program yang bersifat inovatif. Metode penelitian kualitatif digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasilnya menunjukkan bahwa perangkat daerah, dunia usaha dan masyarakat berpartisipasi dalam mengurangi beban biaya hidup masyarakat miskin dan program-program berorientasi pemberantasan kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif dan inovatif untuk memerangi kemiskinan secara berkesinambungan.

Penelitian Puguh Setiyawan Djodi (2019) kajian kualitatif guna mengkaji model dan kendala pelayanan penanggulangan kemiskinan di Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPT-PK) Kabupaten Sragen. Metode penelitian yang digunakan adalah menganalisis obyek penelitian yang utuh untuk memahami manusia. Hasil dari penelitian ini adalah model pelayanan penanggulangan kemiskinan di Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPT-PK) Kabupaten Sragen dibagi menjadi empat basis pelayanan, yaitu Pelayanan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan, pelayanan penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan, pelayanan penanggulangan kemiskinan berbasis sosial ekonomi, dan penanggulangan kemiskinan berbasis keterpaduan data kemiskinan, memadukan data TNP2K dan PPLS-BPS.

Penelitian Johan Arifin (2020) menyatakan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dan sedang dilakukan harus diarahkan secara seimbang pada pendekatan struktural maupun kultural, dengan memunculkan nilai-nilai budaya yang berbeda dari nilai-nilai yang ada dalam kebudayaan yang dominan. Hal ini menjadi penting untuk menurunkan persentase angka kemiskinan serta menghadapi tantangan-tantangan dalam nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia.

Penelitian Reza Darmiyanti (2022) berdasar teori David C. Korten, Program Implementasi Program Keluarga Harapan telah berhasil dilaksanakan karena terdapat kesesuaian antara tujuan program, kemampuan organisasi pelaksana, serta kemampuan kelompok sasaran program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini telah membantu pengentasan kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pengembangan serta inovasi-inovasi yang membantu perekonomian masyarakat.

Penelitian Mohamad Yanuar Pratama et al (2016) menerangkan bahwa Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo menciptakan inovasi *smart card* guna meminimalisir para calo dan lebih memudahkan proses perizinan para pemilik usaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana inovasi pelayanan publik melalui *smart card* pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo. Fokus penelitian ini pada teori atribut inovasi oleh Rogers, yaitu: *relative advantage, compability, complexity, triability, dan observability*.

Penelitian Agung Surya Dwianto (2018) menjelaskan bahwa inovasi merupakan tantangan besar bagi organisasi manapun termasuk organisasi penyedia layanan publik. Penelitian ini mendeskripsikan bentuk inovasi, keberhasilan dan kegagalan inovasi, serta factor pendorong dan penghambat inovasi Kantor Pos Jakarta Utara dalam menjaga eksistensi dan daya saing pelayanan publik. Faktor internal yang mendorong pengembangan inovasi adalah terkait dengan SDM dan visi misi, sementara faktor penghambat adalah sarana dan prasarana serta biaya operasional. Faktor eksternal pendorong pengembangan inovasi adalah kebijakan pemerintah, kemajuan teknologi, dan munculnya jasa pengiriman swasta.

Penelitian Bima Cahya Putra et al (2019) bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penduduk Provinsi Jawa Timur membentuk inovasi pelayanan publik melalui Program “Ayo Kerja”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan inovasi yang telah dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penduduk Provinsi Jawa Timur melalui Program “Ayo Kerja” dengan berlandaskan teori atribut inovasi dari Rogers yang dapat dilihat dari atribut *relative advantage*, *compability*, *complexity*, *triability*, dan *observability*. Hasil menunjukkan inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penduduk Provinsi Jawa Timur melalui Program “Ayo Kerja” mendapat sambutan yang baik dari para pencari kerja walaupun dalam pelaksanaannya sendiri masih terdapat beberapa kekurangan. Program “Ayo Kerja” merupakan inovasi baru dan bisa mengikuti perkembangan teknologi.

Penelitian Hendy Setiawan et al (2020) menganalisis Gerakan masyarakat tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Sleman melalui inovasi pelayanan Lukadesi (Keluarga Berduka Desa Siaga) dengan alat analisis teori proses inovasi De Jong dan Den Hartog, yakni melihat peluang, mengeluarkan ide, mengkaji ide, dan implementasi. Hasil menunjukkan bahwa inovasi Lukadesi menjadi layanan unggulan desa. Inovasi ini mampu menumbuhkan kesadaran administrasi kematian masyarakat di Kabupaten Sleman yang mencapai 90% lebih sehingga data yang ada pada database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih akurat dibandingkan sebelumnya. Inovasi Lukadesi ini telah memenuhi tahapan proses inovasi dengan tingkat partisipasi dan respon publik yang sangat baik.

Dari kajian di atas maka tujuan kajian, yakni menambah kajian tentang inovasi khususnya inovasi pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia. Kajian mengkaji tentang proses inovasi Laboratorium Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan. Di samping itu, penelitian ini juga menggali faktor-faktor penghambat keberhasilan inovasi Laboratorium Kemiskinan dengan menggunakan teori atribut inovasi.

1.6. 2 Administrasi Publik

Administrasi publik diartikan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk menciptakan program yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat, meliputi bagaimana organisasi, kepemimpinan, sumber daya, dan biaya untuk mengatur organisasi pemerintah (Edward H. Litchfield dalam Syafie, 2006:25). Definisi administrasi publik menurut Ibrahim (dalam Revida dkk, 2020:3) administrasi publik merupakan serangkaian dari usaha penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi fungsi manajemen dengan mekanisme kerja serta dukungan dari SDM. Kemudian diperkuat oleh Pasolong (dalam Revida dkk, 2020:3) menjelaskan Administrasi publik, yakni koordinasi antara berbagai pihak untuk memenuhi tuntutan publik dengan cara yang efektif dan efisien.

Diperjelas Atmosudirjo (1982: 265) bahwa administrasi publik berarti: (1) administrasi instansi yang bersifat terbuka untuk publik, artinya antar negara dengan kenegaraan; (2) administrasi yang memiliki tujuan untuk mengatur kenegaraan atau antarkenegaraan. Rahman (2017: 17) menyebutkan Pelayanan publik yakni keseluruhan tindakan yang diambil untuk melayani kebutuhan masyarakat sebagai tanggung jawab dari kebijaksanaan pemerintah kepada masyarakatnya.

Dari berbagai pengertian didapatkan administrasi publik yakni seluruh upaya koordinasi dilakukan penyelenggara pemerintahan dengan melakukan fungsi manajemen sehingga dapat mencapai tujuan pemerintahan dengan pemberian layanan untuk masyarakat. Berdasar

kesimpulan mengenai administrasi publik di atas maka Laboratorium Kemiskinan merupakan bidang kajian administrasi publik, yaitu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

1.6.3 Manajemen Publik

Manajemen publik adalah aspek penting dalam pengelolaan administrasi publik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Salah satu bagian dari upaya tersebut adalah mengatur organisasi, sumber dana, sumber daya dan sarana-prasarana untuk menjalankan berbagai program pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat dan warga negara (Waluyo, 2007: 119). Manajemen publik menurut Hughes (1994) (dalam Sudarmanto et al., 2020: 2) didefinisikan sebagai keterlibatan lembaga dalam mencapai tujuan organisasi dengan efisiensi dan tanggungjawab penuh untuk mencapai suatu target dengan hasil maksimal. Overman (dalam Keban, 2014:92), Manajemen Publik merupakan suatu studi interdisipliner yang menggabungkan berbagai aspek dalam organisasi dengan SDM, keuangan, fisik, informasi, dan politik. Hal ini didasarkan pada *Scientific Management* namun tidak terbatas pada *policy analysis*, 'administrasi publik yang baru' atau kerangka yang lebih baru, melainkan sebagai refleksi dari tekanan-tekanan antara orientasi rational instrumental dan politik.

Laboratorium Kemiskinan melibatkan semua pihak Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengalokasikan APBD dan bekerja sama dengan pihak lain untuk mengimplementasikan, menerapkan, dan mengevaluasi program berdasar sumber daya yang tersedia Perangkat Daerah terkait program pendukung Laboratorium Kemiskinan. Perguruan Tinggi yang terlibat, yaitu Universitas Pekalongan dan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Program Universitas Membangun Desa, Dunia usaha melalui forum CSR berpartisipasi aktif dalam mendukung pendanaan Laboratorium Kemiskinan, kelompok masyarakat berpartisipasi secara aktif melalui program kegiatan yang ada di masing-masing organisasi kemasyarakatan dan media berperan dalam mendukung publikasi dalam promosi.

1.6.4 Pelayanan Publik

Pemberian pelayanan publik dianggap sebagai suatu produk yang tidak memiliki bentuk fisik, namun dapat dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, elemen-elemen seperti *policy making*, desain organisasi, dan proses manajemen harus dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah untuk menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Menurut Sinambela (dalam Pasolong, 2013: 128) pemerintah melakukan berbagai kegiatan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, memberikan kepuasan tanpa harus mengharapkan balasan berupa produk fisik. Agung Kurniawan (dalam Pasolong 2013: 128) menjelaskan pelayanan publik adalah

menyediakan layanan untuk kebutuhan masyarakat berdasar ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Berdasar UU No 25 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1) tentang Pelayanan Publik bahwa pelayanan publik adalah semua kebutuhan yang dipenuhi oleh pemerintah bagi warga negaranya, termasuk barang, jasa, dan pelayanan administratif, merupakan pelayanan publik yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Laboratorium Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan merupakan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan lokus desa miskin yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan. Kegiatan ini dilakukan dengan intervensi yang berbeda, sesuai dengan wilayah desa masing, yaitu desa miskin pesisir, desa miskin perkotaan dan desa miskin pegunungan. Intervensi yang dilakukan di masing-masing wilayah ditujukan memberikan keuntungan bagi masyarakat.

1.6.5 Inovasi Pelayanan Publik

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, Inovasi Pelayanan Publik adalah gagasan atau ide kreatif yang membawa manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi tersebut dapat berupa ide baru, adaptasi atau modifikasi dari yang telah ada, serta perluasan dan peningkatan kualitas dari inovasi yang sudah ada. Dengan demikian,

inovasi Pelayanan Publik adalah suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual.

Menurut Pollit & Hupe (dalam Rosyadi & Indiahono, 2020) menerapkan cara-cara yang berbeda di bidang publik untuk memperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya adalah inovasi, sedangkan Chen, et al (dalam Rosyadi & Indiahono, 2020) Inovasi adalah sebuah gagasan yang relatif baru untuk digunakan dalam ekosistem sektor publik, yang ditandai dengan pengembangan, implementasi dan kreasi bersama untuk menciptakan nilai kepublikan. Inovasi melibatkan berbagai aktor yang terlibat dalam proses yang berfokus pada kebaruan, pengembangan dan implementasi untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Ancok (dalam Wicaksono, A. et al, 2014) berpendapat inovasi adalah usaha guna menemukan sesuatu baru teknik ide-ide kreatif yang berdampak dalam bentuk produk, jasa, proses bisnis, cara baru, kebijakan, dan lain sebagainya, sedangkan menurut Anthony (dalam Wicaksono, A. et al, 2014) inovasi adalah menciptakan sesuatu yang baru dan mengubah situasi yang ada merupakan inovasi.

De Jong & Den Hartog (2003) melihat proses inovasi di empat tahapan, yakni:

1. *Opportunity Exploration* (Melihat peluang)

Mengambil kesempatan membutuhkan pengenalan dari kesenjangan antara fakta yang ada dan yang diharapkan. Peluang akan memicu organisasi untuk mencari cara dalam meningkatkan

pelayanan atau berusaha memikirkan sebuah alternatif baru sebuah proses kerja atau pelayanan. Dengan demikian, keterampilan menemukan peluang merupakan awal dari perilaku inovatif.

2. *Idea Generation* (Mengeluarkan ide)

Untuk menyelesaikan masalah atau memperbaiki kinerja, gaya berfikir konvergen harus digunakan, yaitu dengan menciptakan banyak ide baru dengan menggabungkan dan mengatur ulang informasi dan konsep yang sudah ada. Kreativitas sangat penting dalam tahap ini.

3. *Championing* (Mengkaji ide)

Ketika menghadapi suatu masalah, proses penelitian dan pemikiran divergen dimulai untuk menilai dampak positif dan negatif dari sejumlah ide. Ide yang realistik dipilih dan yang kurang realistik ditolak. Evaluasi dan pengajuan solusi terus dilakukan sampai ditemukan solusi yang paling mungkin berhasil. Pada tahap ini juga melibatkan proses mempengaruhi orang lain dan bernegosiasi untuk mendapatkan dukungan dari koalisi yang dibangun.

4. Implementasi

Pada tahap ini, kita dituntut untuk lebih dari sekedar memikirkan ide kreatif, yaitu implementasi dan eksekusi ide tersebut. Keberanian untuk mengambil resiko juga perlu untuk memahami

probabilitas kegagalan dan kesuksesan, yang menentukan tingkat kontrol perilaku untuk mencapai tujuan atau berinovasi.

Kesimpulan dari pemahaman ini adalah bahwa inovasi dalam konteks administrasi negara didefinisikan sebagai memikirkan dan mengimplementasikan kebijakan yang memberikan manfaat bagi publik, yang original, penting, dan berdampak, salah satunya adalah inovasi Laboratorium Kemiskinan. Laboratorium Kemiskinan yakni inovasi pelayanan publik oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Laboratorium Kemiskinan menempatkan masyarakat miskin sebagai subyek dan memudahkan akses data mengenai kemiskinan di desa-desa yang miskin untuk membentuk laboratoriumnya.

1.6.6 Atribut Inovasi

Menurut Zaltman (1973: 32-50) atribut inovasi dapat mempengaruhi sukses atau tidaknya suatu inovasi diterima oleh anggota sistem sosial. Menurut Zaltman, Duncan dan Holdbek (1973), cepat lambatnya laju suatu inovasi diadopsi oleh anggota sistem sosial dipengaruhi oleh atribut inovasi yang dimilikinya.

Rogers (1995: 212-244) atribut dalam inovasi, yakni:

1. *Relative Advantage* (keuntungan relatif)

Inovasi harus memberikan nilai lebih dibandingkan dengan versi sebelumnya atau produk yang menggantikannya. Selalu ada nilai yang mengesankan yang terkandung dalam inovasi, yang menjadikannya unik dan berbeda dari yang lain. Manfaat jangka

panjang dari inovasi dapat diukur berdasar keuntungan ekonomi, status, dan manfaat lainnya.

2. *Compability* (kesesuaian)

Inovasi harus memiliki kesesuaian dengan inovasi yang akan menggantikannya, untuk menghindari pemborosan biaya, serta memfasilitasi proses adaptasi dan transisi yang lebih mudah. Inovasi tersebut juga harus mempertimbangkan ide-ide dari inovasi-inovasi sebelumnya serta memenuhi nilai-nilai dan keyakinan sosial budaya.

3. *Complexity* (kerumitan)

Inovasi baru mungkin menimbulkan tingkat kerumitan yang lebih tinggi daripada yang ada sebelumnya, namun karena inovasi tersebut menawarkan cara yang lebih baik, hanya diperlukan proses adaptasi. Tingkat kompleksitas dari suatu inovasi juga menentukan seberapa cepat ia dapat diadopsi: semakin mudah dimengerti dan dipahami, semakin cepat ia diadopsi.

4. *Triability* (kemungkinan dicoba)

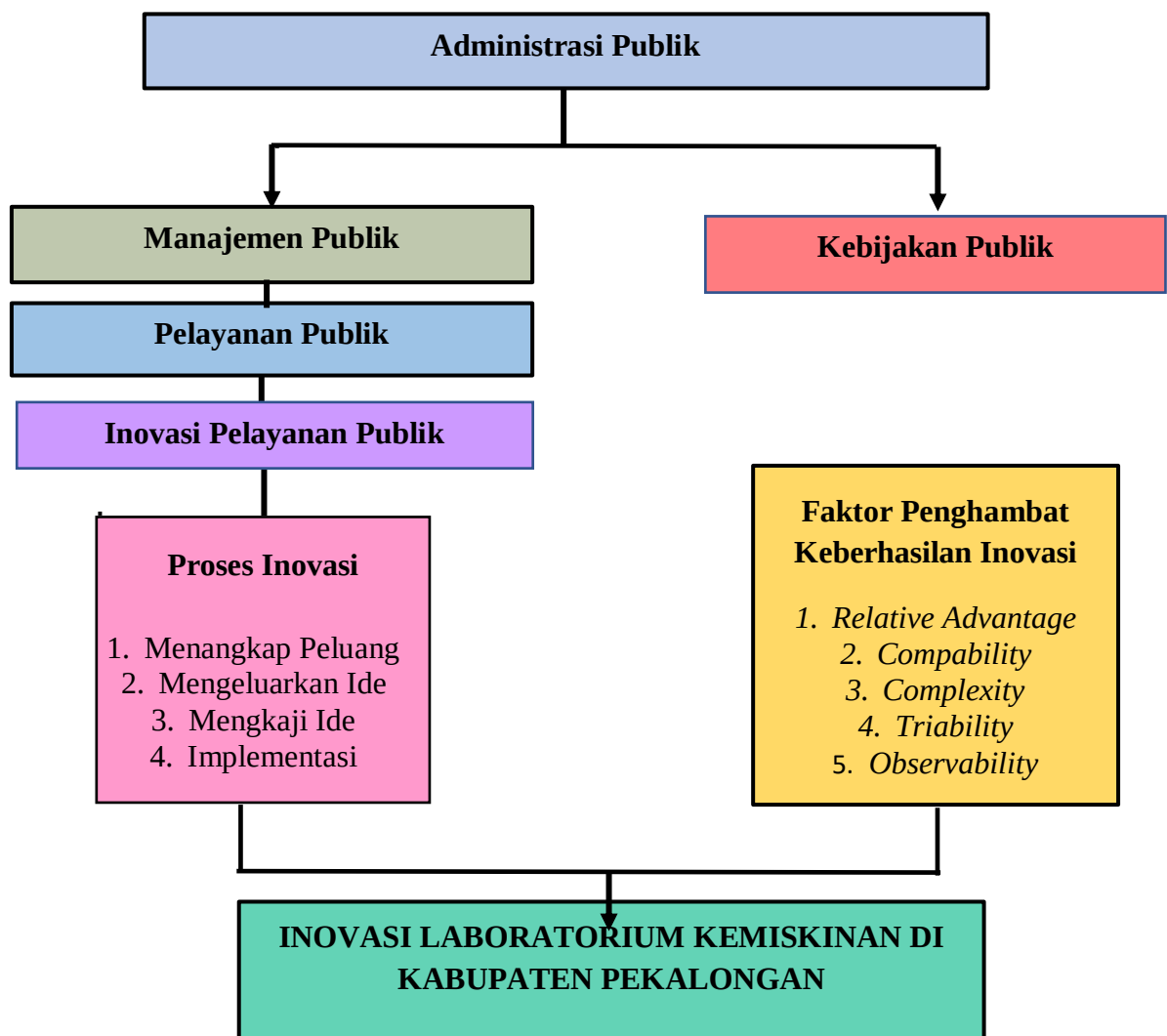
Untuk memastikan bahwa inovasi baru memiliki nilai lebih dibanding inovasi lama, perlu dilakukan sebuah fase "uji coba" di mana orang-orang dapat mencobanya.

5. *Observability* (kemudahan diamati)

Mengamati inovasi mencapai hal lebih baik. Umumnya, inovasi yang bisa diamati, yakni teknologi. Namun, ada beberapa inovasi yang membutuhkan pengetahuan khusus untuk bisa diamati dan dikomunikasikan kepada orang lain.

1.6.7 Kerangka Berfikir

Gambar 1. 3
Kerangka Berpikir



1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiyono (2012) merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi metode penelitian dapat dikatakan sebagai teknik atau cara mencari, memperoleh dan juga mengumpulkan data atau mencari data, baik berupa data primer ataupun data sekunder. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah serta kemudian menganalisis pokok-pokok permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yakni pendekatan kualitatif merupakan upaya yang dilakukan untuk membangun pandangan terhadap sesuatu yang diteliti dengan rinci atau mendalam serta mendapatkan informasi yang lebih detail (Moleong, 2017:6). Menurut Arikunto (2010:151) studi deskriptif adalah model pengumpulan data dengan faktor-faktor pendukung yang dijadikan fokus perhatian peneliti.

Kajian ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mendapatkan data berupa uraian kata. Pendekatan ini dapat digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan dengan jelas dan detail data dan fakta yang ada lebih mendalam. Penelitian ini akan menganalisis pelaksanaan inovasi Laboratorium Kemiskinan dan menemukan faktor-faktor yang menghambat keberhasilan Laboratorium Kemiskinan di Desa Kertijayan.

1.7.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah inovasi pelayanan publik Laboratorium Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan. Laboratorium Kemiskinan sebuah inovasi pelayanan publik guna memecahkan masalah kemiskinan secara efektif, program harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik warga miskin sehingga dapat mencapai tujuan yang tepat dan bermanfaat. Kebaruan dari inovasi Laboratorium Kemiskinan adalah menempatkan masyarakat miskin jadi subyek, pembangun kolaborasi antar *stakeholders (helix)* dan menggunakan pendekatan topografi dalam memberikan program-program di desa pilot.

1.7.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berada di Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah.

1.7.4 Fenomena Penelitian

Tujuan kajian guna menguji pelaksanaan inovasi Laboratorium Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan dengan menggunakan teori proses tahapan inovasi dan teori atribut inovasi serta mendalami faktor-faktor apa saja yang menghambat keberhasilan inovasi Laboratorium Kemiskinan di Desa Kertijayan.

1. Proses Inovasi yang digunakan untuk menganalisis adalah:

a. *Opportunity Exploration* (Melihat peluang)

- 1) Masalah yang melatarbelakangi inovasi Laboratorium Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan
- 2) Peluang yang mendukung inovasi Laboratorium Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan

b. *Idea Generation* (Mengeluarkan Ide)

- 1) Proses penggalian ide
- 2) Pihak-pihak yang terlibat dalam penggalian ide

c. *Championing* (Mengkaji Ide)

- 1) Proses Pengkajian Ide
- 2) Pihak-pihak yang terlibat dalam pengkajian ide

d. Implementasi

Pelaksanaan inovasi Laboratorium Kemiskinan di tiga desa pilot.

2. Atribut inovasi yang digunakan untuk menganalisis adalah:

a. *Relative Advantage* (Keuntungan Relatif)

- 1) Inovasi memberikan manfaat bagi kelompok sasaran.
- 2) Inovasi memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.
- 3) Inovasi memberikan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

b. Compability (Kompatibel)

- 1) Kesesuaian inovasi dengan kebutuhan kelompok sasaran
- 2) Kesesuaian inovasi dengan norma yang berlaku pada kelompok sasaran.

c. Complexity (Kompleksitas)

- 1) Tingkat kesukaran memahami inovasi Laboratorium Kemiskinan.
- 2) Tingkat kesukaran melaksanakan inovasi Laboratorium Kemiskinan.

d. Triability (Triabilitas)

Pelaksanaan ujicoba inovasi sebelum sebelum dilaksanakan dalam skala yang lebih luas.

e. Observability (Dapat diamati)

- 1) Hasil inovasi mudah diamati.
- 2) Hasil inovasi mudah dievaluasi.

3. Faktor-faktor yang menghambat keberhasilan inovasi Laboratorium Kemiskinan khususnya di Desa Kertijayan.

1.7.5 Informan dan Responden Penelitian

Peneliti menggunakan teknik purposive untuk memilih informan kajian ini. Informan yang dipilih yakni seseorang memiliki kapasitas guna memberi data yang relevan untuk masalah yang dikaji. Subjek informan adalah:

1. Pelaksana Laboratorium Kemiskinan, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDA LITBANG) Kabupaten Pekalongan, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDA LITBANG) Kabupaten Pekalongan;
 - b. Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya BAPPEDA LITBANG Kabupaten Pekalongan.
2. Kepala Desa pilot Laboratorium Kemiskinan, yaitu:
 - a. Kepala Desa Kertijayan sebagai model desa miskin perkotaan;
 - b. Kepala Desa Mulyorejo sebagai model desa miskin wilayah pantai;
 - c. Kepala Desa Botosari sebagai model desa miskin wilayah pegunungan.

1.7.6 Interview Guide (Pedoman Wawancara)

Tabel 1. 1
Pedoman Wawancara Penelitian

No	Fenomena	Pertanyaan	Key Informan
Proses Tahapan Inovasi			
1	<i>Opportunity Exploration</i> (Melihat Peluang)	Apa masalah yang menjadi latar belakang inovasi Laboratorium Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan?	Bappeda Litbang
		Apa peluang yang mendukung inovasi Laboratorium Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan?	Bappeda Litbang
2	<i>Idea Generation</i> (Mengeluarkan Ide)	Bagaimana proses mengeluarkan ide sebelum akhirnya lahir inovasi Laboratorium Kemiskinan?	Bappeda Litbang
		Siapa saja yang terlibat dalam tahap mengeluarkan ide ini?	Bappeda Litbang
3	<i>Championing</i> (Mengkaji Ide)	Bagaimana proses mengkaji ide sebelum akhirnya lahir inovasi Laboratorium Kemiskinan?	Bappeda Litbang
		Siapa saja yang terlibat dalam tahap mengkaji ide ini?	Bappeda Litbang
4	Implementasi	Bagaimana pelaksanaan inovasi Laboratorium Kemiskinan di tiga desa pilot?	Bappeda Litbang Kepala Desa Botosari, Mulyorejo dan Kertijayan
		Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan ini?	Bappeda Litbang Kepala Desa Botosari, Mulyorejo dan Kertijayan

No	Fenomena	Pertanyaan	Key Informan
	Atribut Inovasi		
1	<i>Relative Advantage</i>	Apakah inovasi Laboratorium Kemiskinan memberikan manfaat bagi kelompok sasaran? Jika iya, mohon jelaskan apa saja manfaat tersebut.	Bappeda Litbang Kepala Desa Botosari, Mulyorejo dan Kertijayan
		Apakah inovasi Laboratorium Kemiskinan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas? Jika iya, mohon jelaskan apa saja manfaat tersebut.	Bappeda Litbang Kepala Desa Botosari, Mulyorejo dan Kertijayan
		Apakah inovasi Laboratorium Kemiskinan memberikan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan? Jika iya, mohon jelaskan apa saja manfaat tersebut.	Bappeda Litbang Kepala Desa Botosari, Mulyorejo dan Kertijayan
2	<i>Compatibility</i>	Apakah inovasi Laboratorium Kemiskinan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran?	Bappeda Litbang Kepala Desa Botosari, Mulyorejo dan Kertijayan
		Apakah inovasi Laboratorium Kemiskinan sesuai dengan norma yang berlaku pada kelompok sasaran?	Bappeda Litbang Kepala Desa Botosari, Mulyorejo dan Kertijayan
3	<i>Complexity</i>	Bagaimana tingkat kesukaran kelompok sasaran dalam memahami inovasi Laboratorium Kemiskinan?	Bappeda Litbang
		Bagaimana tingkat kesukaran kelompok sasaran melaksanakan inovasi Laboratorium Kemiskinan?	Bappeda Litbang

No	Fenomena	Pertanyaan	Key Informan
4	<i>Triability</i>	Apakah inovasi Laboratorium Kemiskinan diuji coba terlebih dahulu sebelum dilaksanakan?	Bappeda Litbang
5	<i>Observability</i>	Apakah hasil inovasi Laboratorium Kemiskinan mudah diamati?	Bappeda Litbang
		Apakah hasil inovasi Laboratorium Kemiskinan mudah dievaluasi?	Bappeda Litbang
6	Faktor penghambat	Apa saja yang menjadi faktor penghambat keberhasilan inovasi Laboratorium Kemiskinan di Desa Kertijayan?	Bappeda Litbang Botosari, Mulyorejo dan Kertijayan

1.7.7 Sumber Data

Peneliti memakai data primer serta sekunder diuraikan yakni:

a. Data Primer

Data primer dengan observasi di lokasi kajian serta wawancara dengan informan bahan bukti nyata. Pertama dilakukan di Kepala BAPPEDA LITBANG dan Kepala Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya di Kabupaten Pekalongan. Wawancara selanjutnya dilakukan di tiga desa pilot, yaitu Desa Botosari, Desa Mulyorejo dan Desa Kertijayan dengan menggali informasi melalui wawancara dengan para Kepala Desa dan Perangkatnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder tidak langsung melalui buku terkait Pelayanan Publik dan Inovasi Pelayanan Publik dan jurnal mengenai Inovasi Pelayanan Publik, peraturan terkait Inovasi Pelayanan Publik dan Dokumen Laboratorium Kemiskinan Kabupaten Pekalongan.

1.7.8 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik gabungan guna pengumpulan data primer dan sekunder, yakni metode kajian:

a. Observasi

Dengan melakukan observasi, tujuan dari penelitian dapat tercapai dengan mengumpulkan data secara langsung melalui pengamatan yang tepat di lapangan. Observasi menjadi metode yang digunakan untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan tema yang diangkat (Arikunto, 2016:128).

Observasi secara langsung di desa pilot Laboratorium Kemiskinan dan BAPPEDA LITBANG Kabupaten Pekalongan. Inovasi Pelayanan Publik Laboratorium Kemiskinan diharapkan dapat tercermin dengan jelas melalui observasi ini.

b. Wawancara

Dengan wawancara, pewawancara dapat mengumpulkan data melalui pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada responden serta mencatat atau merekam jawaban-jawaban yang

mereka berikan (Hasan, 2002:85). Subyek penelitian akan dipersoalkan oleh peneliti tentang Laboratorium Kemiskinan Kabupaten Pekalongan, guna mengumpulkan informasi yang dapat dipakai untuk menemukan keterkaitan antara fenomena-fenomena yang ada serta memberi kesimpulan dari kajian.

c. Dokumentasi

Catatan penting dari lembaga, organisasi, atau perorangan merupakan sumber informasi yang disebut dokumentasi. Dokumentasi kajian didefinisikan sebagai catatan atau jejak rekam suatu kejadian baik itu tertulis atau tidak yang dijadikan sebagai pelengkap dan/ atau bukti informasi yang telah berlalu serta dijadikan sebagai penguat dari informasi yang telah didapat pada saat wawancara.

1.7.9 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data pada kajian memakai Triangulasi Data di mana Sugiyono (2012:241) triangulasi, yakni penggabungan beragam cara pengumpulan data. Dengan cara ini, peneliti dapat mengecek kredibilitas data dengan menggunakan beragam teknik dan sumber data secara bersamaan. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

1.7.10 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Dalam teknik analisis kualitatif data yang diperoleh tidak dianalisis menggunakan model statistik dan model matematika. Proses analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2021) di mana proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu melalui proses Reduksi data, Penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data sederhana dan memfokuskan data sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran spesifik mengenai obyek penelitian. Dalam proses ini biasanya dilakukan penarikan kesimpulan sebagai inti dari penelitian guna mempertajam analisis. laboratorium Kemiskinan Kabupaten. Dengan demikian peneliti dapat memperoleh gambaran sevara spesifik tentang Laboratorium Kemiskinan di Kabupaten Pekalonganserta konsiten untuk melakukan analisis dan pengkategorian yang lebih tepat.

b. *Display Data/ Penyajian Data*

Penyajian data yang valid dan ditampilkan berbentuk naratif, bagan, tabel, hingga diagram alur merupakan tolok ukur dalam mencapai analisis data yang tepat pada penelitian

mengenai Inovasi Pelayanan Publik Laboratorium Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan.

c. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Tahapan akhir, yaitu dengan menarik sebuah kesimpulan. Menarik kesimpulan merupakan bagian terpenting yang menjadi inti dari proses penelitian yang sedang dilakukan. Secara sederhana, data yang diperoleh selama penelitian harus diuji atau diverifikasi kebenaran, kekuatan, kecocokannya.

